PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN PER KAPITA DAN KEMISKINANTERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTT

Patris Enos Rihi Kana Kale
Alumni STIE Kristen Wira Wacana – Sumba
Muana Nanga
Dosen Business School-Fakultas Ekonomi UPH Jakarta

Abstract

The study is aimed to investigate the effect of general purposes transfer (DAU), per capita GRDP and poverty rate on own sources revenue (PAD) for District level in Province of East Nusa Tenggara (NTT). To estimate the effect of DAU, per capita GRDP and poverty rate on PAD, the panel data regression model are used that is model based on panel data (combination of time series and cross-section data); and pooled least squares (PLS), fixed effect model (FEM) and random effect model (REM) methods are used to estimate the regression model. The result shows that all independent variables that is DAU, per capita GDRP and poverty rate has significant statistical effect on PAD in Province of East Nusa Tenggara. The findings in this study has an important policy implication for the regional and central government, that is, to increase PAD di regional level, DAU and per capita GRDP should be incrased, and the contrary, poverty reduction in regional level should be continously conducted by the government at all level.

Submitted:
JANUARI 2015

Accepted:
AGUSTUS 2015

Keyword: general purpose transfer, own source revenue,

I. Latar Belakang Masalah

Rendahnya kemampuan keuangan daerah sebagaimana ditunjukkan oleh kecilnya sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah merupakan persoalan yang dihadapi oleh sebagian besar kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, termasuk kabupaten dan kota yang terdapat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan peran atau sumbangan PAD yang kecil, hal ini sekaligus juga menunjukkan adanya ketergantungan daerah pada dana-dana Pusat yang masih sangat besar, seperti Dana Alokasi Umum yang selama merupa-kan sumber pendapatan daerah yang sangat dominan.

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2008 sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah untuk kabupaten dan kota secara nasional hanya sebesar 7,25 persen dari total pendapatan daerah, yang berarti sebagian besar berasal dari dana Pusat. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 9,88 persen pada tahun 2012. Kondisi yang lebih memprihatinkan dialami oleh kabupaten dan kota di Provinsi NTT dimana pada tahun 2008, sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah hanya sebesar 4.78 persen dan meningkat menjadi 5,37 persen pada tahun 2012, yang berarti 95 persen kebutuhan dana untuk pembiayaan di wilayah ini disumbangkan oleh Pusat. Suatu tingkat ketergantungan yang luar biasa tingginya.

Untuk lebih jelasnya bagaimana kondisi kemampuan keuangan daerah dilihat dari sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 5 tahun terakhir (2008 – 2012) dapat disimak dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Share Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT dan Indonesia (2008-2012)

Tahun	Share PAD Kabupaten dan Kota secara Nasional (persen)	Share PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT (persen)
2008	7.25	4.78
2009	7.49	5.74
2010	7.40	-
2011	8.57	4.57
2012	9.88	5.37

Sumber: Badan Pusat Satistik, Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota (Tahun 2008 – 2012).

Di satu sisi dalam era otonomi, kabupaten dan kota dituntut harus mandiri dalam pengelolaan pembangunan di daerahnya termasuk keuangan, tetapi fakta menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah kabupaten dan kota seperti yang dialami kabupaten dan kota di Provinsi NTT sungguh memprihatinkan. Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki kabupaten dan kota di wilayah ini jelas tidak mendukung untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah tersebut.

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa kemampuan keuangan daerah dari kabupaten dan kota di wilayah Provinsi NTT tersebut rendah? Jawabannya tentu ada berbagai macam faktor yang menjadi penyebabnya.Namun, penulis menduga bahwa faktor utama yang menjadi penyebabnya rendahnya PAD di wilayah NTT adalah faktor kemiskinan dan rendahnya pendapatan penduduk, disampingkarena rendahnya kemampuan pemerintah daerah itu sendiri untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber PAD yang ada di wilayah masing-masing.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di wilayah Provinsi NTT hingga Maret 2014 adalah sebanyak 994,67 ribu jiwa atau 19,82 persen. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau sekitar 89,91 persen terdapat di daerah perdesaan dan sisanya sebanyak 10,09 persen terdapat di perkotaan. Untuk daerah perdesaan tingkat kemiskinan adalah sebesar 22,15 persen, sedangkan untuk daerah perkotaan tingkat kemiskinannya adalah sebesar 10,23 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Provinsi NTT adalah lebih merupakan persoalan atau fenomena perdesaan (*rural phenomenon*), dan hal ini juga terjadi untuk kasus Indonesia secara keseluruhan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi kemiskinan di Provinsi NTT, berikut disajikan data kemiskinan dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di NTT (2010-Maret 2014)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota (K)	Desa (D)	K +D	Kota(K)	Desa(D)	K + D
2010	107.40	906.70	1,014.10	13.57	25.10	23.03
2011	117.04	895.87	1,012.91	12.50	23.36	21.23
Maret 2012	115.50	897.10	1.012.60	12.22	22.98	20.88

General purpose transfer, own source revenue

Maret 2013	113.57	879.99	993.56	11.54	22.13	20.03
Maret 2014	100.34	894.33	994.67	10.23	22.15	19.82

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT (Kajian Ekonomi Regional Prov. NTT, Triwulan II-2014, Tabel 5.5).

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh pengaruh tingkat kemiskinan, pendapatan per kapita dan dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.Pendapatan per kapita merupakan peubah atau faktor yang secara langsung memengaruhi kemampuan orang untuk membayar kewajibannya kepada negara, termasuk dalam hal ini kewajiban untuk membayar pajak, sehingga peubah dianggap relevan untuk dijadikan salah satu faktor yang memengaruhi PAD. Selain itu, transfer dana dari Pusat ke Daerah, seperti Dana Alokasi Umum secara prinsip juga dimaksudkan untuk mendorong daerah dalam mengembangkan potensi yang ada di masing-masing wilayah, termasuk potensi pendapatan asli daerah yang ada di setiap wilayah kabupaten dan kota.

II. Persoalan dan Tujuan Penelitian

Sejalan dengan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah, selanjutnya dirumuskan persoalan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dan sejauhmana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana dan sejaumana pengaruh pendapatan per kapita terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimana dan sejauhmana pengaruh kemiskinan terhadap pendapatan asli kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

Sejalan dengan persoalan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan per kapita terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinis Nusa Tenggara Timur.

III. Tinjauan Teoretis dan Studi Terdahulu

3.1. Tinjauan Teoretis

3.1.1. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa komponen, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah atau bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Dengan kata lain, penerimaan PAD merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita, 2007).

Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah. Pajak daerah ditemukan dalam berbagai literatur maupun dalam Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Daerah, antara lain dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan pengertian Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Kenneth Davey (1988) menyatakan bahwa salah satu kriteria untuk menilai potensi pajak daerah adalah elastisitas.Elastisitas dapat dengan mudah diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau GNP.PDRB merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah atau region pada suatu jangka waktu tertentu.Dari sini dapat di lihat bahwa hubungan elastisitas antara pajak dearah yang diperoleh, dan pertumbuhan ekonomi yang dinilai dari pertumbuhan PDRB per kapita menggambarkan pertumbuhan yang otomatis dari potensi pajak. Dengan kata lain dalam konteks pajak daerah, semakin tinggi PDRB secara otomatis semakin tinggi pula pajak yang diterima daerah.

Menurut Kenneth Davey ada berbagai ciri dari pajak daerah adalah :

1) Pajak daerah berpengaruh terhadap anggaran pemerintah daerah dimana pajak tersebut dikumpulkan
2) Pemerintah daerah mengatur pajaknya sendiri mulai dari mengatur berapa banyaknya orang yang terkena pajak daerah, menentukan dasar penarikan, pemberian pembebasan atau pengecualian dan lainnya

Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan penerimaan yang dominan bagi suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, selanjutkan disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa Lain-lain PAD yang sah meliputi : Pertama; hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Kedua; jasa giro, ketiga; pendapatan bunga,Keempat; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Kelima; komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan jasa oleh daerah. dari kelima komponen lain-lain PAD tersebut

merupakan sumber keuangan daerah dan masing-masing memberikan konstribusi bagi penerimaan PAD. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lain-lain PAD yang sah" antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.

Sumber PAD yang sah adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Penerimaan lain-lain sebagai sumber PAD dalam APBD mencakup berbagai jenis penerimaan dari hasil penjualan alat-alat dan bahan sisa, penerimaan dari sewa, bunga pinjaman bank dan giro, dan penerimaan denda yang dipikul kontraktor.

3.1.2. Konsep Dana Alokasi Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Seperti telah diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah merupakan dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan bantuan berupa DAU yang besarnya sekurang – kurangnya 26 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.Untuk daerah provinsi menerima sebesar 10 persen dari DAU yang ditetapkan, sedangkan kabupaten/kota sebesar 90 persen. Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 yang menyatakan bahwa pembagian DAU kepada seluruh provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Saragih, 2003:55). Tetapi penerimaan daerah dari unsur PAD saja belum mampu kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah (Saragih, 2003:49) sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat. Bantuan pusat ini biasa disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

Hipotesis1 : Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.1.3. Konsep Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita dalam hal ini diproksi dengan menggunakan PDRB per

kapita, yaitu Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk di daerah (kabupaten atau Kota) yang bersangkutan.Produk Domestik Regional Bruto Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB Per Kepala atau per satu orang penduduk; sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di dalam suatu wilayah atau daerah.

Pendapatan per kapita digunakan karena dianggap merefresentasikan kemampuan ekonomi atau daya beli dari penduduk suatu daerah.Semakin tinggi penda-patan per kpita suatu daerah, itu berarti bahwa penduduk daerah tersebut memiliki kemampuan atau daya beli yang semakin tinggi. Dengan kemampuan ekonomi atau daya beli penduduk yang semakin besar, diharapkan permintaan terhadap produksi di daerah itu juga akan mengalami peningkatan, yang berarti pula kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan juga akan berkembang. Hal ini pada gilirannnya akan berdampak terhadap semakin meningkatnya kemampuan penduduk untuk membayar berbagai kewajibannya terhadap pemerintah termasuk pajak dan retribusi daerah yang merupakan unsur-unsur dari pendapatan asli daerah (PAD).

Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB Per kapita maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (Saragih,2003). Pendapat ini sejalan dengan Halim (2000), bahwa Pendapatan Asli Daerah di pengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto Per kapita.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dirumuskanlah hipotesis yang menunjukkan hubungan antara pendapatan per kapita dengan pendapatan asli daerah sebagai berikut.

Hipotesis 2: Pendapatan per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.1.4. Konsep Kemiskinan

Pengertian kemiskinan secara umum dipahami dengan suatu permasalahan yang dikaitkan dengan sektor ekonomi masyarakat, padahal jika dilihat secara luas kemiskinan dapat dilihat dari sudut pandang baik sosial maupun budaya dari masyarakat.Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat dimana terdapat kondisi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dimulai dari pemenuhan papan, sandang, maupun pangan.Fenomena seperti hal ini biasa terjadi dikarenakan rendahnya penghasilan masyarakat dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Secara konseptual, kemiskinan dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu kemis-kinan absolut (*absolute poverty*) dan kemiskinan relatif (*relative poverty*) dimana perbedannya terletak pada standar penilainya.Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin seraca relatif.Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan.Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan

dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. Untuk kasus Indonesia, BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumahtangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan) (BPS, 2012).

Berdasarkan garis kemiskinan (makanan dan non makanan) itu, maka ditetapkanlah seseorang orang itu termasuk dalam kategori atau tidak miskin. Untuk tahun 2013, garis kemiskinan Indonesia (kota dan desa) adalah Rp 271.616 per kapita per bulan. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 28.066,6 juta jiwa atau sekitar 11,37 persen dari total penduduk Indonesia.

Secara umum, kemiskinan menggambarkan suatu kondisi dimana seseorang atau rumahtangga itu tidak mempu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum-nya. Kalau kebutuhan dasar minimumnya saja tidak mampu untuk dipenuhi, maka sudah pasti eorang atau rumahtangga tersebut tidak mampu untuk memenuhi berbagai kewajibannya terhadap negara, seperti membayar pajak, dan lain sebagainya

Seseorang yang memiliki pendapatan yang tinggi dapat menyisakan hasil pendapatanya untuk memutar kembali uang yang telah diperoleh agar dapat menghasilkan tambahan pendapatan.Sedangkan seseorang yang memiliki pendapatan rendah tidak dapat menyisakan ataupun memutar kembali uang yang diperoleh, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari sudah kesulitan. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan yang tinggi di dalam suatu wilayah akan cenderung menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah atau daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dirumuskanlah hipotesis mengenai hubungan kemiskinan dengan pendapatan asli daerah sebagai berikut.

Hipotesis 3: Kemiskinan diduga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang apa saja yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ternyata telah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti. Dalam bagian ini dipaparkan beberapa hasil penelitain yang pernah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, dengan tujuan untuk dapat dijadikan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

Indra Rindu Datu (2012), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Makassar Tahun 1999-2009 memperoleh hasil sebagai berikut :

1) Perkembangan Realisasi pendapatan asli daerah Makassar yang terus mengalami peningkatan karena sebagian besar realisasi penerimaan pajak daerah mencapai target yang telah ditetapkan. dan sistem pengelolaan komponen PAD sudah berjalan secara optimal.
2) Perkembangan dari data yang telah diolah serta hasil perhitungan empirik yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

3) Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar.

Penelitian lain, adalah penelitian yang dilakukan oleh Muchtholifah (2010) di Kota Mojokerto.Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, Inflasi, Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto, ditemukan bahwa secara simultan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Industri dan Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto. Namun pengaruh variabel produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah adalah yang paling kuat atau dominan dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya.

Soegeng Wahyoedi (2009) dalam penelitiannya yang berjudul "Kemampuan Dana Alokasi Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia Tahun 2001-2003", ditemukan bahwa Dana Alokasi Umum ternyata memiliki pengaruh yang positif dan signifikan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia, dengan koefisien regresi masing-masing sebesar 5203,491 dan 3299,22.

Agustina Ngundju Awang (2005) dalam penelitiannya yang berjudul "Dampak Produk Domestik Regional Bruto dan Bantuan Pemerintah Pusat terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur"ditemukan bahwa:

1) PDRB nominal perkapita (YKAP) berpengaruh positifdan signifikan terhadap PAD perkapita (PADKAP), namun demikian hubungan PAD per kapita dengan perubahan di dalam PDRB nominal per kapita tersebut ternyata bersifat inelastis
2) Bantuan pusat per kapita (GRKAP) berpengaruh positif dan signifikan ter-hadap PAD perkapita (PADKAP), namun demikian hubungan PAD per kaipta dengan bantuan pusat per kapita tersebut ternyata bersifat inelastis.
3) Secara bersama-sama Produk Domestik Regional Bruto nominal perkapita (YKAP) dan bantuan perkapita (GRKAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD perkapita (PADKAP).
4) Peubah PDRB nominal perkpita dan bantuan perkapita (GRKAP) mampu menjelaskan 85,87 persen dari perubahan atau variasi di dalam PAD perkapita.

IV. Metode Penelitian

4.1. Kerangka Berpikir

Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya.Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan tiap – tiap pemerintah daerah dapat mem-bangun infrastruktur ekonomi yang baik di daerahnya masing – masing, guna meningkatkan pendapatannya.

Bertambahnya Dana Aloasi Umum (DAU) dan besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita harus diikuti pula dengan menurunnya tingkat kemiskinan, karena dengan menurunnya tingkat penduduk miskin hal ini akan berarti semakin banyak penduduk yang bekerja dan penduduk yang bekerja ter-sebut dapat membayar pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1 Kerangka Berpikir

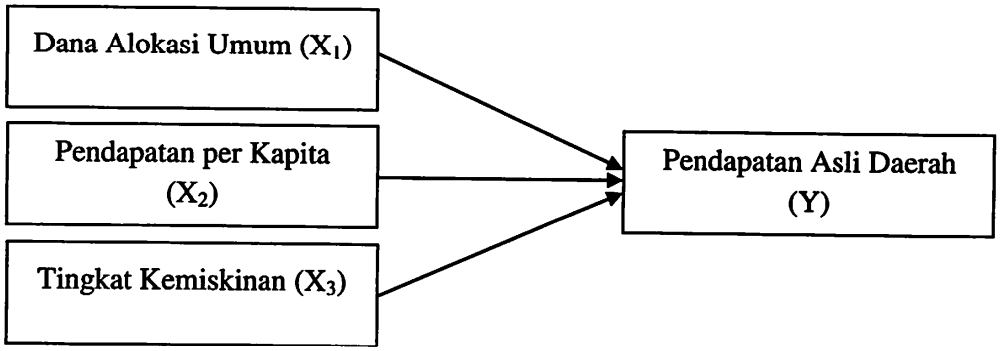

4.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan dari data *cross-section (*20 kabupaten dan kota di NTT) dan data runtut waktu (*time series*: 2009–2012. Data yang dikumpulkan mencakup data tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana AlokasiUmum (DAU), PDRB Per kapita dan Kemiskinan yang semuanya bersumber dari Badan Pusat Statistik seperti Data dan Inoformasi Kemiskinan Kabupaten dan Kota, PDRB Kabupaten dan Kota, Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik yang dilakukan, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu :

1) Analisis grafik
   Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotnya data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya
2) Analisis statistik
   Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan nilai Z-skewness. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), Jika tingkat signifikansinya > 0,05, maka data itu terdistibusi normal dan dapat dilakukan model regresi berganda. Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov dapat dilihat dari :

1) Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas < 0,05, maka distribusi data ada lah tidak normal.
2) Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas > 0,05, maka distribusi data adalah normal.

4.3.2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas.Dan jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas.Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui adanya masalah heteroskesdatisitas, kita bisa mengguna-kan korelasi jenjang Spearman, Park test, Goldfeld-Quandt test, BPG tast, White test atau Glejser test. Bila menggunakan korelasi jenjang Spearman, maka kita harus menghitung nilai korelasi untuk setiap variabel independen terhadap nilai residu, baru kemudian dicari tingkat signifikansinya. Park danGlejser test memiliki dasar test yang sama yaitu meregresikan kembali nilai residu ke variabel independen.

Salah satu cara untuk mengurangi masalah heteroskesdatisitas adalah menurunkan besarnya rentang (range) data. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan renta ng data adalah melakukan transformasi (manipulasi) logaritma. Tindakan ini bisa dilakukan bila semua data bertanda positif.

4.3.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi.Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi. Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel error-term pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel error – term pada periode lain yang bermakna variabel *error term* tidak random. Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga iji signifikansi tidak kuat. Uji ini dilakukan pada penelitian yang menggunakan data *time series* .Oleh karena data dalam penelitian ini merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*, maka harus dilakukan uji autokorelasi terlebih dahulu.

4.3.4 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menentukan dan mengetahui ada tidaknya hubungan dua atau lebih variabel yang saling berkaitan dalam suatu model.multikolinearitas terjadi apabila terdapat nilai koefisien korelasi variabel diluar batas – batas penerimaan, dan sebaliknya apabila nilai – nilai koefisien korelasi terletak di dalam batas – batas peneriman maka tidak akan terjadi multikolinearitas.

Menurut Gujarati (1995), adanya kemungkinan terjadi multikolinearitas apabila F hitung dan R^2 signifikan secara parsial atau seluruh koefisien regresi tidak signifikan apabila menggunakan uji-t (t-test). Pengujian ini dapat dilakukan dengan Menggunakan deteksi klien. Deteksi klien dilakukan dengan melakukan regersi suatu varia bel independen dengan variabel indepen lain. Rule of thumbdengan membandingkan nilai R^2 model dengan nilai R^2 Auxiliary.Bila nilai R^2 regresi Auxiliary lebih besar nilai R^2 model, maka model mengandung gejala

multikolinearitas.Bila nilai R^2 regresi Auxiliary lebih kecil nilai R^2 model, maka model tidak mengandung gejala multikolinearitas.

4.4. Model Analisis dan Metode EstimasiYang Digunakan

Oleh karena dalam penelitian ini data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum, pendapatan per kapita dan kemiskinan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah data panel, maka model analisis yang digunakan adalah model regresi data panel. Sedangkan untuk estimasi model regresi data panel,ada tiga metode yang dapatdigunakan, yaitu metode *pooled OLS*, metode efek tetap (*fixed effect model*), dan metode efek random (*random effect model*).

Model umum regresi data panel (dalam notasi matriks)[1] adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X'_{it}\beta + \mu_{it} \quad \text{..... [1]}$$

dimana:

i = 1, 2, ..., N, menunjukkan rumahtangga, individu, daerah, perusahaan, dan lain sebagainya (dimensi data *cross-section).*

t = 1, 2, ..., T, menunjukkan dimensi waktu (*time series*).

α = koegfisien intersept yang merupakan scalar

β = koefisien slope dengan dimensi K x 1, dimana K adalah banyaknya peubah bebas

Y_{it} = peubah tak bebas untuk unit individu ke-i dan unit waktu-t

X_{it} = peubah bebas untuk unit individu ke-i dan unit waktu ke-t.

Umumnya, aplikasi data panel menggunakan model komponen error satu arah (*one way error component*) untuk gangguan (*disturbances*) dengan :

$\mu_{it} = \mu_i + v_{it}$ ..... [2]

dimana: $\mu_i$menunjukkan efek spesifik individu yang *unobservable* dan v_{it} menunjukkan faktor gangguan (*disturbance*) sisanya.

Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini, maka model regresi yang digunakan adalah model regresi dalam bentuk double log dan dirumuskan sebagai berikut :

$$LnY = \alpha + \beta_1 LnX_1 + \beta_2 LnX_2 + \beta_3 LnX_3 + e \quad \text{..... [3]}$$

dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah (Rp)

X_1= Dana Alokasi Umum (DAU) (Rp)

X_2= Pendapatan per kapita yang diproksi dengan PDRB per kapita(Rp)

X_3= Kemiskinan diukur dengan tingkat kemiskinan (%)

α = konstanta

β_1= Koefisien regresi dana alokasi umum (DAU)

β_2= Koefisien regresi pendapatan per kapita

β_3= Koefisien regresi tingkat kemiskinan

Ln = Logaritma Natural (Log)

e= Error (faktor pengganggu)

---

[1] Dikutip dari Bambang Juanda dan Junaidi (2012), Ekonometrika Deret Waktu : Teori & Aplikasi. hal. 178-179. IPB Press. Bogor.

V. Analisis dan Bahasan

5.1. Hasil Uji Asumsi Klasik

5.1.1. Uni Normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal atau tidak. Hasil uji normalitas yang diolah dengan Eviews dapat ditunjukkan dalam Gambar 5.1 sebagai berikut :

Gambar 5.1

Hasil Uji Normalitas

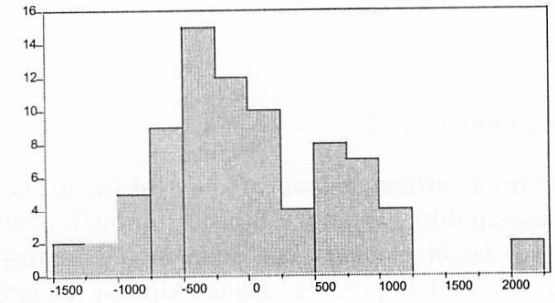

Series: Standardized Residuals	
Sample 2009 2012	
Observations 80	
Mean	-4.43e-13
Median	-79.66887
Maximum	2087.014
Minimum	-1463.472
Std. Dev.	706.8615
Skewness	0.500840
Kurtosis	3.297116
Jarque-Bera	3.638803
Probability	0.162123

Sumber : Data yang diolah, 2014

Pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov dapat dilihat dari :

1) Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas < 0,05, maka distribusi data adalah tidak normal.
2) Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas > 0,05, maka distribusi data adalah normal.

Sesuai dengan hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas (0,162123) > 0,05, maka distribusi data adalah normal.

5.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil residual testerlihat bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada estimasi, dimana residualnya tidak membentuk suatu pola atau residualnya cenderung konstan.

Gambar 5.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Diagram *Scatterplot*)

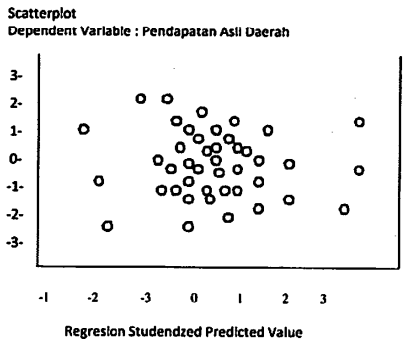

Sumber : Data yang diolah, 2014

Dari gambar 5.2. pada grafik Scatterplot terlihat bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dari gambar tersebut bahwa jelas tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, Kemiskinan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.1.3. Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam model persamaan regresi berganda ini dapat dilihat dari Durbin-Watson test. Durbin-Watson (DW) statistic adalahsebesar 1.938565 dengan n = 80 dan k = 3, nilai dl (1,56); d_u (1,71) dengan nilai kritis 0,05 (5 persen) nilai tersebut berada dl antara $d_u$dan (4–d_u) atau 1,71 < 1.938565 < 2,29, maka dapat disimpulkan bahwa dalam regresi linier tersebut tidak terdapat autokorelasi atau tidak terjadi korelasi diantara kesalahan pengganggu.

5.1.4. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada tidaknya masalah multikolinearitas dalam regresi berganda, maka dapat dilihat dalam matriks korelasi (*correlation matrix*).

Tabel 5.1
Hasil Uji Multikolinearitas
(Correlation Matrix Antar Variabel Independen)

	DAU	PDRB	KEMISKINAN
DAU	1.000000	0.085872	-0.264500
PDRB	0.085872	1.000000	-0.225915
KEMISKINAN	-0.264500	-0.225915	1.000000

Sumber : Data yang diolah, 2014

Tabel 5.1 di atas memperlihatkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dengan nilai lebih dari 0,8. Data dikatakan teridentifikasi multikolinearitas apabila koefisien korelasi antar variabel independen lebih dari satu atau sama dengan 0.8 (Gujarati,2009), sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terdapat multikolinearitas.

5.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Estimasi model regresi data panel tentang pengaruh dana alokasi umum, pendapatan per kapita dan kemiskinan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilakukan dengan menggunakan metode *Pooled OLS. Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* menghasilkan temuan sebagai berikut :

Tabel 5.2
Hasil Estimasi Model Pendapatan Asli Daerah NTT
Dependent Variable: Ln Y

Peubah	Metode Pooled OLS		Metode FEM		Metode REM	
	Koefisien	t-stat	Koefisien	t-Stat	Koefisien	t-Stat
C	-0.369826	-0.56694	4.078103	2.559497	0.876572	1.242138
Ln X_1	0.450404	4.636543*	0.203852	2.402301**	0.279235	3.533964*
Ln X_2	0.673135	5.88836*	0.530859	2.807651**	0.700922	5.348966*
Ln X_3	-0.113544	-1.162686	-1.038183	-2.450833**	-0.217951	-1.457396
Adjust. R^2	0.586602		0.827922		0.503789	
F-stat	38.36634		18.27698		27.73549	
DW-stat	0.882363		1.938565		1.494983	

Sumber : Data Hasil Penelitian 2014, (Diolah).

Keterangan:
C = konstanta
Ln Y = PAD
Ln X1 = Dana Alokasi Umum
Ln X2 = Pendapatan per kapita
Ln X3 = Tingkat Kemiskinan

** Signifikan pada tingkat signifikansi (α)= 1 persen*
*** Signifikan pada tingkat signifikansi(α) = 5 persen*

Untuk menentukan metode estimasi mana yang lebih tepat apakah metode *Pooled Least Squares* (PLS)atau metode*Fixed Effect* (FEM) dilakukan peng-ujian dengan menggunakan uji F. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi data panel dengan metode FEM lebih baik daripada model regresi data panel dengan metode PLS.

Sedangkan untuk menentukan metode estimasi yang lebih tepat apakah metode PLS atau metode REM dilakukan pengujian dengan menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Hasil uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan bahwa model regresi data panel dengan metode REM lebih baik daripada model regresi data panel dengan metode PLS.

Adapun untuk menentukan metode estimasi yang lebih tepat untuk digunakan apakah metode FEM atau metode REM dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Hasuman. Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa nilai statistik *Hausman* lebih kecil dari nilai kritis, yang berarti bahwa model regresi data panel dengan metode FEM lebih baik daripada model regresi data panel dengan metode REM. Oleh karena itu, dalam mengestimasi model PAD yang telah dikemukakan sebelumnya, model FEM dianggap lebih tepat untuk diguna-kan daripada model REM.

Tabel 4.4

Hasil Uji Model Menggunakan *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.487968	3	0.0369

Sumber : Data Primer 2014
(Diolah)

5.3. Dampak Dana Alokasi Umum, Pendapatan per Kapita dan Kemiskinan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

5.3.1. Dampak Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari nilai koefisien regresi X_1 sebesar 0.203852, memiliki arti jika Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan 1 persen, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0.203852 persen. Dengan kata lain, Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengetahui apakah dampak dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan atau tidak signifikan dilakukanlah pengujian dengan uji t. Hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung = 2.402301 >nilai t tabel = 1.66488, yang berarti Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soegeng Wahyoedi (2009) dalam penelitiannya yang berjudul "Kemampuan Dana Alokasi Umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia Tahun 2001 – 2003", yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia, dengan koefisien regresi masing-masing sebesar 5203,491 dan 3299,22.

PAD dan DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:46).

Kedua sumber pendapatan daerah ini memang sulit untuk dipisahkan.Pemerintah daerah belum mampu mengandalkan PAD nya sendiri untuk membiayai desentralisasi. Begitu pun dengan pemerintah pusat yang tidak mau sepenuhnya memberikan DAU karena akan menambah ketergantungan daerah kepada pusat. Kombinasi kedua sumber pendapatan ini jika melihat kepada hasil penelitian, maka akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi daerah guna meningkatkan belanja modal. Semakin tinggi PAD disertai dengan semakin meningkatnya DAU akan meningkatkan belanja modal daerah. Sebab daerah akan memiliki pendapatan yang besar sehingga belanja pun dapat ikut ditingkatkan. Meskipun pada kenyataannya peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan DAU, sebab melihat bahwa penentuan DAU ikut ditentukan pula oleh besarnya PAD (PP No 55

tahun 2005 tentang dana perimbangan).

5.2.2. DampakPendapatan Per kapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai koefisien regresi X_2 sebesar 0.530859, memiliki arti bahwa apabila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mengalami kenaikan 1 persen, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0.530859 persen. Dengan kata lain, PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah per kapita.

Untuk mengetahui apakah dampak dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan atau tidak signifikan dilakukanlah pengujian dengan uji t. Hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa t hitung = 2.807651 > t tabel = 1.66488 yang berarti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).Namun karena koefisien regresi tersebut lebih kecil daripada satu, maka hal ini berarti bahwa perubahan di dalam PAD tersebut tidak elastis terhadap perubahan di dalam PDRB per kapita.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari Agustina Ngundju Awang (2005) dalam penelitiannya yang berjudul "Dampak Produk Domestik Regional Bruto dan Bantuan Pemerintah Pusat terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur", dimana ditemukan baik PDRB nominal per kapita maupun bantuan pusat per kapita memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) per kapita. Temuan ini juga sejalan dengan temuan dari Indra Rindu Datu (2012), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar Tahun 1999-2009,dimana ditemukan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar. Juga sejalan dengan temuan Muchtholifah (2010) dalam penelitiannya di Kota Mojokerto, yang menemukan dimana variabel produk domestik regional bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan paling kuat terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya.

5.2.3. Dampak Kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai koefisien regresi X_3 sebesar -1.038183 memiliki arti jika tingkat kemiskinan mengalami kenaikan 1 persen, akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 1.038183 persen. Untuk mengetahui apakah dampak dari kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan atau tidak signifikan dilakukanlah pengujian dengan uji t. Hasil dari uji t tersebut menunjukkan bahwa t hitung 2.450833 > t tabel 1.66488, yang berarti tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk mengetahui seberapa besar ketiga peubah bebas tersebut, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita dan Kemiskinan mampu menjelaskan perubahan atau variasi di dalam peubah terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat dari koefisien determinasi (R^2) dimana dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,827922, yang berarti bahwa 82,79 persen dari variasi didalam peubah tingkat Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh tiga peubah bebas yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan sisanya 17,20 persen dijelaskan oleh variablel lain di luar model yang digunakan.

Dengan derajat bebas (db) pembilang (nominator) = k-1 = 3-1 = 2 dan derajat bebas penyebut (denominator) n – k = 80 – 3 = 77 dan dengan tingkat signifikansi ((α) = 0,05 (5 persen) diperoleh nilai F table sebesar 3,15; sementara nilai F hitung = 38,36634, lebih besar dari nilai F table = 3,15. Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita dan Kemiskinan bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

VI. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, selanjutnya dapat ditarik bebe-rapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Nusa Tenggara Timur. Artinya, kalau Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan mengalami peningkatan atau kenaikan.
2. Pendapatan (PDRB) Per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Nusa Tenggara Timur. Artinya, apabila Pendapatan atau PDRB per kapita mengalami kenaikan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan mengalami kenaikan atau peningkatan juga.
3. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Nusa Tenggara Timur. Hal ini berarti bahwa apabila tingkat kemiskinan mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami penurunan.

6.2. Implikasi Kebijakan

Hasil temuan dalam penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan yang penting, yaitu:

1. Untuk meningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dana alokasi umum (DAU) dapat dijadikan sebagai salah satu instrument fiskal yang penting bagi pemerintah pusat dan daerah. Alokasi dan penggunaannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga benar-benar dapat mendorong peningkatan PAD di kabupaten dan kota yang ada.
2. Upaya untuk meningkatan penndpatan (PDRB) per kapita juga dapat dijadikan sebagai salah satu kebijakan pemerintah daerah di dalam mendorong pening-katan PAD di daerahnya, karena melalui peningkatanpendapatan atau PDRB per kapita secara langsung akan berdampak kepada kemampuan masyarakat dalam membayar kewajibannya kepada pemerintah seperti pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD tersebut.
3. Oleh karena tingkat kemiskinan berpengaruh negatip dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), maka upaya pengentasan kemiskinan di daerah-daerah perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah setempat di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Azis,1997. " *Pendapatan Asli Daerah*".Jakarta: Erlangga

Badan Pusat Statistik:

1. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berbagai Tahun)
2. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten dan Kota (berbagai tahun)
3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota (berbagai tahun)
4. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makto Indonesia Tahun 2012

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTT. 2014. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II-2014.

Barata Atep Adya.2004.Pendapatan Asli Daerah. Terjemahkan Barata, Jakarta

Davey, Kenneth,1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek dan Relevansinyabagi Dunia Ketiga, terjemahan Amanullah, UI Press,Jakarta.

Elita , 2007.Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Rajawali

Gujarati, N. D. 2009. Basic Econometrics, Fourth Edition The McGraw-Hill.

Harianto, David & Adi Priyo Hadi. 2007. *Hubungan antara dana alokasi umum,belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita.*Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

Indra Rindu Datu K. Analisis Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Makassar Tahun 1999-2009.

Juanda, B. dan Junaidi. 2012. Ekonometrika Deret Waktu: Teori & Aplikasi. IPB Press Bogor.

Muchtholifah. 2010. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, Inflasi, Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit ANDI

Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2009 –2012

PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Sajogyo, 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, (Jakarta: Yayasan OborIndonesia,)

Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Bisnis Cetakan Kedelapan , Alfabeta, Bandung.

Sukirno, Sadono.1978. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: Jakarta Press.

Sukirno, Sadono. 2001. Ekonomi Mikro. Penerbit Rajagrafindo Jakarta.

Sumardi, Mulyanto, 1983 *Sumber Penduduk, Kebutuhan Pokok dan PerilakuMenyimpang*. Jakarta

Sutjipto Wirosardjono, 1998.Pertumbuhan Penduduk Indonesia Catatan Analisa,Prisma, No 3 Tahun XVII LP3ES Jakarta.

Todaro, 1997:105." *Pertumbuhan ekonomi*". Jakarta

Undang – undang Nomor.32 tahun 2004, *"Undang-undang Otonomi Daerah"*, Jakarta, Fokusmedia, 2004

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wahyoedi, Soegeng. 2001-2003. Kemampuan dana alokasi umum dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah dan produk domestik Regional bruto di Indonesia.